

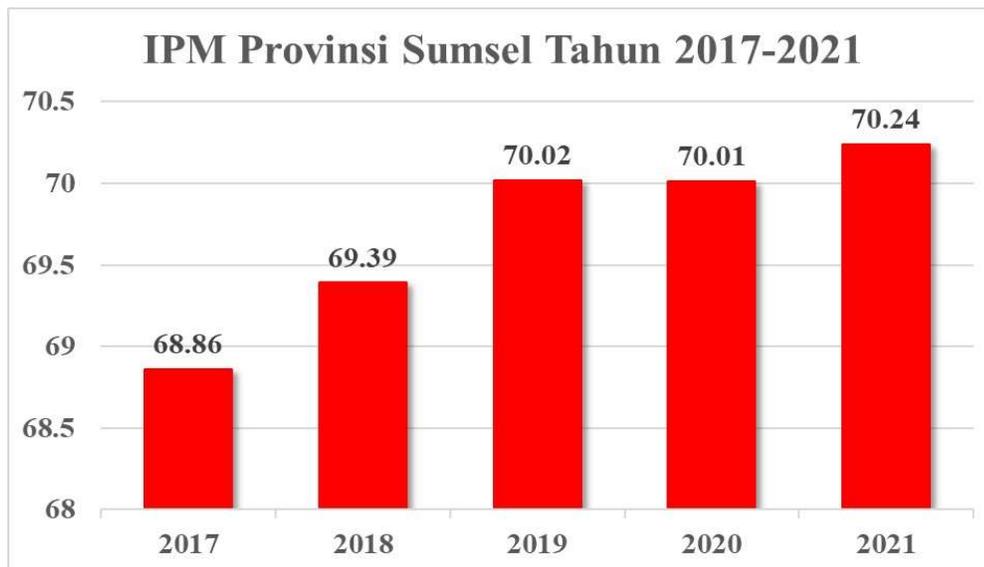
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki hak untuk secara independen mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan potensi dan kapabilitas daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya (Marit *et al*, 2021). Pemberian otonomi daerah yang luas kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi (Fadhillah & Marliyah, 2022) Dalam implementasinya, kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah yang diperoleh melalui pemanfaatan potensi daerah secara mandiri, yang kemudian digunakan untuk pembangunan daerah (Sari & Mustanda, 2019).

Namun, perlu diingat bahwa penerapan otonomi daerah tidak selalu memiliki dampak positif. Otonomi daerah juga dapat menyebabkan ketimpangan di antara daerah serta memunculkan permasalahan lain, seperti kurangnya kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota dalam memenuhi harapan pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Zamra & Ernawati, 2019). Contohnya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, salah satu daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian fiskal regional 2021, terdapat peningkatan bertahap pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan ini sejalan dengan pencapaian ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Kenaikan IPM tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.



Gambar 1.1

Grafik IPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan (data diolah)

Peningkatan tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017 hingga 2021 tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut. Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat kedua tertinggi dalam tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu sebesar 3,14%. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan termasuk yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Sumatera, bahkan melebihi rata-rata tingkat nasional (detik.com). Selain itu berdasarkan hasil kajian fiskal regional 2021 juga menyatakan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan berada di peringkat ke-19 dari 34 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, yaitu sebesar 6,49%. Menurut Sijabat *et al* (2014), faktor keuangan dapat menjadi penyebab kegagalan pembangunan suatu daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan masalah utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor kunci yang sangat penting dalam keberhasilan dan kesuksesan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal akan menjamin

tercapainya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui tingkat pencapaian dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penerimaan dan belanja daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dalam satu periode anggaran (Susanto, 2019). Pengukuran kinerja keuangan penting untuk mengevaluasi pencapaian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan ini tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang disusun oleh pemerintah pusat dan masing-masing pemerintah daerah (Puspita & Pangastuti, 2022).

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk melihat tren yang terjadi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan adalah melalui penerapan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2012).

Umumnya, APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah masih rendah, maka kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi terbatas. Hal ini menunjukkan rendahnya kinerja keuangan di daerah tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dibandingkan dengan dana transfer tersebut (Millenia, 2022).

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, separuh dari total provinsi di Indonesia belum mencapai kemandirian fiskal dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (kppod.org). Provinsi Sumatera Selatan termasuk

provinsi yang masih belum optimal atau memiliki tingkat kemandirian yang rendah, sebagaimana terlihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2

Grafik Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Sumber : BPK RI, 2023 (data diolah)

Berdasarkan analisis kinerja keuangan dalam pendekatan tingkat kemandirian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih belum mencapai kinerja keuangan yang optimal, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam gambar 1.2 ditemukan bahwa tingkat kemandirian tertinggi hanya mencapai 51,39% yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang, sedangkan tingkat kemandirian terendah adalah milik Kabupaten Empat Lawang sebesar 2,90%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah, dengan tingkat kemandirian yang tidak merata dan tergolong rendah.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti faktor kemakmuran pemerintah daerah (Marhawai, 2015), ukuran pemerintah daerah (Masdiantini & Erawati, 2016), tingkat ketergantungan pemerintah daerah (Aulia & Rahmawaty, 2020) dan belanja modal daerah (Mulyani & Wibowo, 2017).

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan adalah kemakmuran pemerintah daerah. Kemakmuran ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, yang dapat diindikasikan melalui total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD, maka semakin makmur suatu daerah tersebut (Marhawai, 2015). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan (Nasir, 2019). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, yang mencakup hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Penelitian sebelumnya oleh Marhawai (2015) menunjukkan bahwa kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun penelitian lain oleh Maiyora *et al* (2015) menyimpulkan bahwa kemakmuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran pemerintah daerah yang mencerminkan seberapa besar atau kecilnya objek pemerintah daerah itu, yang dapat diukur melalui besarnya total aset pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang baik dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Tama & Adi, 2018). Penelitian sebelumnya oleh Masdiantini & Erawati (2016) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, namun Sari & Mustanda (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan adalah tingkat ketergantungan pemerintah daerah, yang dapat dilihat dari jumlah dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat (Aulia & Rahmawaty, 2020). Tingkat ketergantungan dapat diukur dengan indikator dana perimbangan. Tingkat dana perimbangan yang tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan yang masih

tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat berharap bahwa dengan adanya transfer tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja daerah. Penelitian sebelumnya oleh Setiani & Ismunawan (2022) menemukan bahwa tingkat ketergantungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian oleh Suryaningsih & Sisdyani (2016) menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Faktor terakhir yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Perencanaan belanja modal yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam memfasilitasi dan membiayai kegiatan daerah, serta berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Darwanis & Saputra, 2014). Penelitian sebelumnya oleh Sari & Mustanda (2019) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun penelitian oleh Antari & Sedana (2018) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Terdapat perbedaan dalam hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, terdapat *research gap* yang menarik untuk diteliti kembali mengenai pengaruh kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk memperjelas penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai fokus penelitian karena rendahnya kinerja keuangan pemerintah yang diukur melalui tingkat kemandirian. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "**Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kemakmuran Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat batasan pembahasan yang ditetapkan untuk memfokuskan dan membatasi lingkup masalah yang diteliti. Batasan pembahasan dalam penelitian ini meliputi penggunaan variabel independen, yaitu Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2017-2021. Analisis penelitian ini menggunakan software *Eviews* versi 12.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
5. Untuk mengetahui pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Manfaat Teoritis yang didapat dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi bagi penulis mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat mengetahui faktor yang bisa terjadi disebabkan oleh kinerja keuangan daerah

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi yang bisa dijadikan untuk bahan referensi dan evaluasi untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah.